

Upaya Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dalam Mencegah Gangguan Lingkungan

UPAYA FRONT PEMBELA SUARA RAKYAT (FPSR) DALAM MENCEGAH GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN PERUSAHAAN INDUSTRI DI KABUPATEN GRESIK**Devi Ananda Sari**15040254058 (PPKn, FISH, UNESA) devisari3@mhs.unesa.ac.id**Rr. Nanik Setyowati**0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) Rr_nanik_setyowati@yahoo.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) upaya LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri di Kabupaten Gresik dan (2) hambatan yang dialami LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri di Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif eksploratif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 langkah yang dilakukan oleh LSM FPSR yakni langkah awal dan langkah lanjutan. Langkah awal berupa (1) sosialisasi; (2) pengawasan masyarakat dalam bentuk pemantauan terhadap pencemaran; dan (3) komunikasi dengan perusahaan (pemberian saran). Sedangkan langkah lanjutan berupa (1) peneguran; (2) pelaporan; dan (3) penekanan masyarakat dalam bentuk pemasangan banner yang berisi sindiran dan aksi demonstrasi dengan mengikutsertakan media massa. Hambatan yang dialami oleh LSM FPSR, yakni (1) kesulitan mendapatkan anggota, (2) mahal biaya pembuangan dan pengolahan limbah B3, (3) melakukan pemantauan terhadap pencemaran udara berupa bau dan bising, (4) minimnya ketersediaan dana di LSM FPSR.

Kata Kunci: LSM FPSR, Mencegah, Pencemaran, Perusahaan Industri.

Abstract

This study aimed to describe (1) the efforts of the FPSR NGO in dealing with environmental harassment caused by industrial companies in Gresik Regency and (2) the obstacles experienced by the FPSR NGO in dealing with environmental harassment caused by industrial companies in Gresik Regency. The method of this research was using qualitative descriptive explorative. Data was collected using in-depth interview techniques and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman models. The results of the study indicated that there were 2 steps taken by the NGO FPSR namely the initial step and next step. The first step is (1) socialization; (2) community supervision in the form of monitoring pollution; and (3) communication with the company (giving advice). While the next step is (1) affirmation; (2) reporting; and (3) the emphasis of the community in the form of installing banners containing satire and demonstrations by including the mass media. Obstacles experienced by NGOs FPSR, namely (1) difficulties in obtaining members, (2) the high cost of disposal and processing of B3 waste, (3) monitoring air pollution in the form of odors and noise, (4) lack of available funds in the NGO FPSR.

Keywords: NGO FPSR, Prevent, Pollution, Industrial Companies.

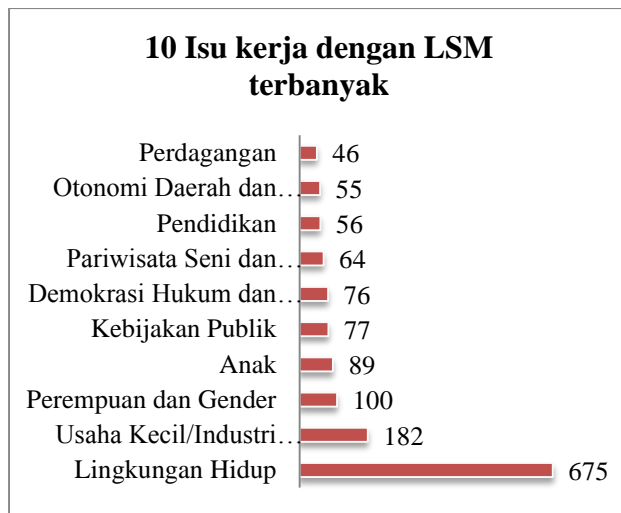
PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering disingkat dengan LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh orang perorangan ataupun sekelompok orang yang kinerjanya secara sukarela memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum tanpa memikirkan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang telah dilakukannya. Terdapat lima karakteristik dari LSM yakni yang pertama, LSM adalah lembaga non pemerintahan atau sering juga disebut dengan *Non Government Organization* (NGO). Kedua, LSM didirikan secara sukarela. Ketiga, dalam menjalankan kegiatannya untuk masyarakat umum, tidak dengan tujuan mencari keuntungan (nirlaba). Keempat, LSM didirikan dengan

tujuan untuk melayani masyarakat secara umum dan bukan pada anggota atau para aktivisnya sendiri. Kelima, LSM ini tidak berorientasi pada kekuasaan politik secara langsung. Hal inilah yang membedakan LSM dengan partai politik.

Berdasarkan data SMERU, LSM dengan kerja isu lingkungan hidup paling dominan di Indonesia, yakni mencakup 675 organisasi. Pada data tersebut dapat diketahui bahwa terkait dengan isu lingkungan hidup di Indonesia menempati situasi yang darurat. Sementara LSM untuk bidang usaha kecil atau industri rumah tangga mencapai 181 organisasi dan menjadi LSM dengan jumlah kuantitas kedua terbanyak di Indonesia. Berikut grafik 10 isu kerja dengan LSM terbanyak yang

telah di teliti oleh lembaga penelitian SMERU di tahun 2017.



Grafik 1. Isu Kerja dengan LSM terbanyak di Indonesia

Sumber: berita online www.tirto.id, 2017 diakses pada tanggal 22 November 2018

Berdasarkan grafik 1, menunjukkan bahwa permasalahan yang saat ini banyak terjadi di Indonesia yakni terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Menurut Sutammihardja (1987: 1) bahwa suatu permasalahan yang ada dalam lingkungan hidup ini adalah hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia. Mengenai hal-hal yang langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia seperti terganggunya kesehatan karena pencemaran atau keracunan, rusaknya usaha karena erosi maupun banjir, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia seperti menurunnya produktivitas dan lain sebagainya. Hal-hal yang paling banyak dipermasalahan terkait lingkungan hidup yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan perusakan hutan. Salah satu LSM yang turut menyikapi adanya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik adalah LSM FPSR. Cikal bakal berdirinya LSM tersebut tidak lain karena tingginya permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pihak korporasi atau perusahaan industri di Gresik.

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap individu. Seperti yang tertera dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Hal tersebut menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu kaidah yang mendasar dan sering sekali dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Meskipun demikian, kenyataan saat ini adalah masih

banyak orang perorangan maupun badan usaha yang justru melakukan aktivitas yang dapat mengganggu lingkungan hidup. Orang maupun badan usaha yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai penjahat lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan atau korporasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dasar hukum mengenai tanggung jawab sosial tersebut yakni, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012), UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH). Berdasarkan pasal 68 UU 32/2009 menyatakan bahwa,

"Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban, a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan; c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Adanya undang-undang tersebut tidak lain karena dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dimana harus diatur oleh negara guna terwujud kemakmuran rakyat. Selain itu, didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya undang-undang tersebut, secara hukum perusahaan-perusahaan di Indonesia telah terikat dengan UU tersebut. CSR merupakan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, tanggung jawab tersebut tidak hanya pada karyawan saja melainkan juga pada masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat pada umumnya.

Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial tersebut. sebagaimana yang diungkapkan oleh Eko Murdiyanto (2012: 47-50) mengatakan bahwa perusahaan dapat memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang seperti (1) pengembangan ekonomi; (2) kesehatan dan gizi masyarakat; (3) pengelolaan lingkungan; (4) pendidikan, ketrampilan dan pelatihan; dan (5) sosial, budaya, agama, dan infrastruktur. Untuk di bidang pengelolaan lingkungan, perusahaan dapat melakukan kegiatan seperti penanganan limbah, pengelolaan sampah rumah tangga, reklamasi, dan penanganan dampak lingkungan lainnya.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup yang terdiri atas lingkungan

alam, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang disebut sebagai lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Upaya pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan manusia itu sendiri. Agar upaya pelestarian lingkungan berjalan tidak hanya efektif dan efisien melainkan juga keberlanjutan, maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu tindakan pemerintah terkait dengan pelestarian lingkungan yakni dengan mengeluarkan kebijakan AMDAL. Di Indonesia sudah lama menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap pelaksanaan usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Tujuan secara umum AMDAL tidak lain adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Meskipun AMDAL ini sudah diterapkan cukup lama di Indonesia namun masih juga terjadi penyimpangan pada pelaksanaan AMDAL sehingga terjadi pencemaran lingkungan seperti halnya di Kabupaten Gresik yang merupakan kawasan industri.

Hal ini disebabkan belum maksimalnya proses pengelolaan limbah di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan berita *online* yang dipublikasikan oleh detik news pada tanggal 07 Januari 2016 bahwa Jawa Timur dinilai belum maksimal kelola limbah B3. Berita tersebut memuat data pada tahun 2014, jumlah beban limbah B3 di Jawa Timur mencapai 19,4 juta ton atau sekitar 1,6 juta ton per bulannya. Limbah B3 terdiri dari lumpur pengolahan limbah cair atau *sludge* IPAL, partikulat *fly ash* dan *bottom ash*, *steel slag*, oli bekas hingga bahan kimia bekas. Berdasarkan jumlah tersebut, 66,4% beban limbah B3 dihasilkan dari Kabupaten Gresik, yakni sekitar 12,9 juta ton per tahun atau 1,1 juta ton per bulan. (www.news.detik.com diakses pada tanggal 23 November 2018).

Data lain yang dipublikasikan oleh berita *online* Trans.com menyebutkan bahwa permasalahan limbah B3 di Gresik merupakan permasalahan yang tergolong sangat besar dan bahkan mencapai pada level Provinsi. Suatu organisasi Ecoton pernah membuat laporan bahwa di Gresik sejak 2014 memproduksi limbah B3 melebihi batas normal dengan rincian cat beban limbah sebesar 194.512 ton per tahun, industri komponen otomotif sebesar 12.906.054 ton per tahun, dan industri makanan minuman sebesar 0,41 ton per tahun (www.Trans.com diakses pada tanggal 26 Desember 2018).

Kabupaten Gresik merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2018 ini sebesar 1.319.314 jiwa yang terdiri dari 664.288 jenis kelamin laki-laki dan 655.026 berjenis kelamin perempuan. Luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.107 jiwa/Km², hal ini dapat dikatakan cukup padat karena mengingat bahwa Gresik merupakan kota kecil. Kabupaten Gresik ini memiliki berbagai julukan salah satunya dijuluki sebagai kota “Santri”. Kata santri disini yang dimaksud bukan dalam arti santri yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah singkatan dari julukan “Kawasan Industri”. Banyak berdiri perusahaan baik itu dari berbagai kategori mulai dari kecil, menengah maupun besar di wilayah Gresik ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Sensus Ekonomi (SE) di Gresik, Berikut jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Gresik tahun 2015.

Tabel 1. Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah industri besar dan sedang
1.	Wringinanom	21
2.	Driyorejo	83
3.	Kedamean	4
4.	Menganti	34
5.	Cerme	101
6.	Benjeng	16
7.	Balongpanggang	1
8.	Duduksampeyan	5
9.	Kebomas	67
10.	Gresik	9
11.	Manyar	29
12.	Bungah	6
13.	Sidayu	12
14.	Dukun	6
15.	Panceng	4
16.	Ujungpangkah	4
17.	Sangkapura	-
18.	Tambak	-
	Jumlah	402

Sumber: www.gresikkab.bps.go.id diakses pada tanggal 24 November 2018

Masyarakat di Kabupaten ini sangat menggantungkan diri pada kegiatan industri di Gresik karena di Gresik ini pula merupakan Kota yang memiliki UMR tertinggi kedua setelah Kota Surabaya. Kabupaten Gresik juga dikenal sebagai kota kumuh sehingga pemerintah pun menunjuk Kabupaten Gresik sebagai lokasi yang mengimplementasikan program KoTaKu (Kota Tanpa

Kumuh). Gresik merupakan bagian dari lokasi implementasi program KoTaKu tersebut didasarkan pada fakta yang diperoleh dari www.pu.go.id.

Banyaknya usaha di Kabupaten Gresik, baik itu usaha dalam kategori kecil, menengah maupun kategori besar, pasti akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat lebih menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Memang banyak hal positifnya ketika terdapat banyak usaha dalam suatu kota namun, disisi lain selain berakibat positif bagi daerah, usaha-usaha perindustrian di Kabupaten Gresik juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari masalah lingkungan, kesehatan, kependudukan, hingga masalah-masalah sosial lain yang akan dapat mengubah pola hidup masyarakat di Kabupaten Gresik itu sendiri.

Banyaknya Industri di kawasan Gresik, merupakan faktor penyebab paling dominan dalam memunculkan pencemaran lingkungan. Banyak pabrik yang kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya, karena mereka hanya memikirkan keuntungan, keuntungan dan keuntungan saja dalam usahanya sehingga pencemaran terjadi dimana-mana, baik itu pencemaran udara, tanah, maupun pencemaran air. Setiap malam warga harus merasakan bau ammonia sangat menyengat yang dihasilkan oleh pabrik. Mayoritas pabrik-pabrik disekitar pemukiman warga beroperasi pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketenangan warga saat beristirahat. Seperti halnya berita yang dipublikasikan oleh SurabayaPost.id pada tanggal 16 April 2018 yang mana pada saat itu warga perumahan Sumput Asri memrotes PT. Miwon Indonesia karena bisingnya suara mesin *power plane* dan polusi udara dengan bau menyengat yang dihasilkan oleh PT. Miwon Indonesia (www.SurabayaPost.id diakses pada tanggal 24 November 2018).

Bukan hanya pencemaran di udara saja, pencemaran air juga nampak terjadi di wilayah Gresik. Berdasarkan berita *online* yang dipublikasikan oleh Antara News Jawa Timur pada tanggal 12 September 2017 bahwa warga merasa terganggu dengan polusi yang ditimbulkan *stock pile* atau tempat penyimpanan sementara batu bara sebelum dijual milik PT Dwiraksa. Meskipun sudah beroperasi 7 tahun, namun tempat penimbunan batu bara tersebut tidak mempunyai izin. *Stock pile* tersebut menimbulkan polusi berupa debu dan bau yang menyengat, selain itu air rembesan dari *stock pile* terlarut ke sungai. Keberadaan bangunan *stock pile* PT Dwiraksa yang memakan badan sungai Desa Tirem tersebut juga menyebabkan banjir ketika musim hujan, karena aliran air tidak lancar akibat tersumbat bangunan (www.jatim.antaranews.com diakses pada tanggal 24 November 2018).

Selain itu, pada tanggal 01 September 2018 berita yang dipublikasikan oleh Radar Surabaya menunjukkan adanya pencemaran tanah yang dilakukan oleh perusahaan industri di wilayah Gresik. Pada berita tersebut memuat bahwa, telah terjadi pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara sembarangan. Lokasi pembuangan limbah tersebut berada di dua tempat yakni di belakang Kantor Balai Desa Ngepung dan di pinggir jalan dekat dengan lapangan Desa Ngepung. Jenis limbah yang di lokasi tersebut adalah majun terkontaminasi, gram terkontaminasi, *fly ash*, *bottom ash* serta limbah sisa plastik. Pembuangan awal dilaporkan mencapai 3 truk dan terus bertambah jumlahnya (www.radarsurabaya.jawapos.com diakses pada tanggal 24 November 2018).

Pencemaran air yang terjadi di Gresik menyebabkan air PDAM di beberapa wilayah menjadi keruh, ada pula yang mengandung banyak kaporit hingga baunya dapat tercium. Ketika musim kemarau datang, PDAM tidak memiliki stok air untuk warga. Daerah resapan air tanah telah berkurang sehingga warga tidak memiliki alternatif sumber air dan sangat bergantung pada PDAM. Banyak pula pabrik yang belum memiliki alat untuk mensterilkan limbah dan langsung membuangnya melalui air maupun udara, hal inilah yang menjadi penyebab dari semua pencemaran yang telah terjadi di Kota industri ini. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan mengganggu kesehatan masyarakat Gresik yang berujung pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Gresik.

Permasalahan di atas, menjadi tolak ukur munculnya beberapa organisasi nonpemerintahan atau LSM di Gresik. Berdasarkan berita *online* (www.gresiknews.co yang diakses pada tanggal 24 November 2018) bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Gresik sudah tercatat sebanyak 125 namun yang aktif hanya sebanyak 90 LSM saja salah satunya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pembela Suara Rakyat (LSM FPSR). FPSR tersebar di 16 Kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan Kantor pusatnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo. FPSR baru berdiri pada tanggal 11 Desember 2015 yang didirikan oleh Aris Gunawan.

Berdirinya LSM FPSR tersebut dilatarbelakangi karena keresahan warga Gresik akibat permasalahan lingkungan hidup seperti halnya pencemaran baik itu pencemaran ai, udara maupun tanah yang disebabkan oleh perusahaan yang berdiri di area wilayah Gresik tersebut. Adanya permasalahan yang sudah disinggung di atas, menggerakkan Aris Gunawan untuk mendirikan LSM FPSR demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. Keikutsertaan LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup didasarkan pada UU No. 32 tahun 2009 pasal 67 yang

berbunyi “Setiap orang berkewajiban mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”, dan juga pada pasal 70 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Meskipun LSM FPSR ini masih berumur 4 tahun namun sudah tergolong tinggi partisipasinya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kabupaten Gresik terutama permasalahan lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan LSM FPSR dalam iuran untuk membeli 3 mobil *ambulance* untuk warga Gresik secara gratis. LSM FPSR ini menyediakan 3 mobil *ambulance* yang dapat digunakan warga Gresik secara gratis. *Ambulance* milik FPSR tersebut mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2018 dan FPSR siap melayani warga yang membutuhkan bantuan rujukan kesehatan selama 24 jam. Harapan LSM FPSR dengan keberadaan *ambulance* tersebut dapat membantu masyarakat yang kesulitan mendapat layanan di rumah sakit (www.SurabayaPost.id diakses pada tanggal 26 Desember 2018).

Terdapat pula fakta yang termuat dalam berita *online* yang dipublikasikan oleh LiraMedia.co.id pada tanggal 06 Desember 2018 menyatakan bahwa warga bersama dengan LSM FPSR menemukan limbah B3 jenis *slug* besi diduga milik PT. Ispatindo dibuang sembarangan di lahan milik warga. Hal tersebut ditemukan tim LSM FPSR saat sidak di lokasi pembuangan limbah di lahan milik warga di kawasan Jalan Raya Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Berdasarkan sidak yang telah dilakukan diketahui limbah tersebut diangkut oleh 4 truk tronton sejak pekan lalu dari PT. Ispatindo. Salah satu warga yang diminta mengelola limbah tersebut mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa limbah yang dikelolanya berkategori limbah B3. Adanya kasus tersebut LSM FPSR bersama warga peduli lingkungan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik dan DLH Provinsi Jawa Timur serta Tipiter Polres Gresik agar pembuangan limbah B3 jenis *slug* besi yang diduga milik PT. Ispatindo segera ditindak secara tegas (www.LiraMedia.co.id diakses pada tanggal 26 Desember 2018).

Pada tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan berita *online* yang dipublikasikan oleh SurabayaPost.id bahwa FPSR telah menggelar aksi damai di depan pabrik PT. Surya Pertiwi Nusantara. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap dugaan kriminalisasi manajemen PT Surya Pertiwi Nusantara kepada sejumlah warga Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. FPSR juga menduga bahwa berdirinya pabrik tersebut telah menyalahi aturan karena pengurukan lahan pabrik dengan memakai urukan *slag* besi yang dapat mencemari lingkungan terutama pada sumber mata air

(www.SurabayaPost.id diakses pada tanggal 26 Desember 2018). Berdasarkan data maupun fakta yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya mengaji Upaya LSM Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan Perusahaan Industri di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai (1) upaya LSM Front Pembela Suara Rakyat dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri di Kabupaten Gresik, dan (2) Hambatan yang dialami LSM Front Pembela Suara Rakyat dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya dan hambatan LSM Front Pembela Suara Rakyat dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri di Kabupaten Gresik.

Upaya yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu proses pengendalian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri di Kabupaten Gresik. Teori yang digunakan dalam mengaji penelitian ini adalah teori pengendalian sosial atau kontrol sosial dari Travis Hirschi. Suatu kontrol sosial ini dapat dilakukan oleh individu terhadap individu, kelompok terhadap individu, maupun kelompok terhadap kelompok. Pada penelitian ini kontrol sosial dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok. Kelompok yang melakukan kontrol adalah kelompok masyarakat yakni LSM FPSR, dan yang dikontrol adalah kelompok ekonomi yakni perusahaan industri di Kabupaten Gresik. Kontrol sosial tersebut dilakukan oleh LSM FPSR dengan tujuan agar perusahaan industri dapat menaati aturan pada UU No. 32 tahun 2009 yang mana pihak korporasi memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Gangguan pada lingkungan hidup terdapat beberapa bentuk gangguan, namun pada penelitian ini memfokuskan pada bentuk gangguan berupa pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah, air maupun udara yang dilakukan oleh perusahaan industri. Tercemar atau tidaknya lingkungan dapat diukur dengan suatu alat tertentu dan dengan baku mutu lingkungan sebagai patokannya. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 butir (13) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa,

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

METODE

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan upaya LSM Front Pembela Suara Rakyat dalam menangani gangguan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan industri di Gresik maka pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini tidak berbentuk kata-kata melainkan hasil dari wawancara, catatan, maupun dokumen resmi lainnya. Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif adalah untuk mendeskripsikan dengan cara menggali mengenai upaya yang diterapkan oleh LSM FPSR dalam mencegah adanya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan industri di Gresik.

Pada penelitian ini, memfokuskan penelitian pada upaya suatu lembaga swadaya masyarakat di Gresik yakni Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) dalam mencegah adanya gangguan lingkungan hidup. Gangguan lingkungan hidup itu sendiri terdapat beberapa macam, namun di penelitian ini hanya membatasi gangguan yang berupa pencemaran-pencemaran, baik itu pencemaran air, udara maupun tanah. Pencemaran itu sendiri dapat disebabkan oleh perilaku individu dan juga perusahaan industri, namun penelitian ini membatasinya khusus untuk pencegahan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri, karena faktor utama yang menyebabkan pencemaran di wilayah Gresik adalah aktivitas dari suatu pabrik yang berdiri di wilayah Gresik itu sendiri.

Pelaksanaan pada penelitian ini melalui empat tahapan yakni tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan yang terakhir tahap evaluasi dan pelaporan. Sedangkan sumber data atau informan penelitian menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Teknik tersebut menurut Sukmadinata (2005: 101) adalah teknik dalam penetapan sampel penelitian yang mana terpilihnya sampel karena menjadi sumber dan kaya dengan informasi terkait dengan fenomena yang ingin diteliti. Penelitian ini memfokuskan upaya LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan industri di Gresik, sehingga informan dalam penelitian ini adalah pendiri dari LSM FPSR itu sendiri yakni Bapak Aris Gunawan, 1 Anggota LSM FPSR yang masih aktif yakni Bapak Widodo, serta 2 warga sekitar perusahaan yang melakukan gangguan terhadap lingkungan hidup.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena industri sedang maupun besar banyak berdiri di Kecamatan tersebut. Selain itu, markas besar atau sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pembela Suara Rakyat ini berada di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo. Untuk pengambilan data terhadap warga sekitar perusahaan yang melakukan gangguan lingkungan, yakni di rumah informan.

Adapun teknik dan alat pengumpul data yaitu berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin, sehingga dalam melakukan wawancara, pewawancara hanya membawa pedoman yang berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan lalu dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi di lapangan. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data maupun gambaran dari subjek melalui media tertulis maupun dokumen lainnya. Dokumen dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Bungin, 2010: 123).

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana kegiatan analisis data dilalui dengan 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data atau kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Proses triangulasi sumber tersebut dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Proses triangulasi teknik pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mendapatkan kehidupan yang sehat merupakan hak setiap individu dalam masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian melakukan pencemaran lingkungan sama halnya dengan merampas hak individu masyarakat.

Faktanya saat ini, penegakan hukum terkait dengan kejahatan lingkungan hidup masih lemah. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Gresik, yang mana pelaku dari kejahatan lingkungan hidup paling banyak dilakukan oleh perusahaan industri. Lemahnya penegakan hukum kejahatan lingkungan di wilayah Gresik ini menjadi salah satu faktor meningkatnya pencemaran lingkungan yang

dilakukan oleh perusahaan industri. Seperti yang diungkapkan oleh Aris (43 Tahun).

“...Yang membuat saya jengkel itu lemahnya hukum kejahatan lingkungan hidup *mbak*. Jadinya para pelaku kejahatan itu tidak merasa takut adanya hukuman kejahatan lingkungan. Padahal sebenarnya kejahatan lingkungan hidup kan lebih berbahaya daripada narkoba *mbak* karena efek dari pencemaran-pencemaran kan bisa sampai ke anak cucu kita nantinya *mbak*...”

Permasalahan tersebut menjadi latar belakang LSM FPSR turut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan-pencegahan terhadap gangguan lingkungan khususnya yang dilakukan oleh perusahaan industri. Upaya yang dilakukan oleh LSM FPSR tersebut, dilalui dengan dua langkah yakni langkah awal dan langkah lanjutan. Langkah awal yang dilakukan oleh LSM FPSR terkait dengan mencegah terjadinya pencemaran-pencemaran lingkungan yakni (1) sosialisasi, (2) pengawasan masyarakat yang berupa pemantauan pencemaran, dan (3) komunikasi dengan perusahaan (pemberian saran).

Proses pertama pada langkah awal yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah mengadakan sosialisasi. Hal tersebut dilakukan karena dirasa banyak masyarakat Gresik khususnya masyarakat yang berada didekat perusahaan industri, kurang memahami terkait dengan pencemaran lingkungan serta bahayanya limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Sasaran sosialisasi LSM FPSR adalah masyarakat Gresik, terkhususnya masyarakat yang bertempat tinggal paling dekat dengan perindustrian. Tujuan mengadakan sosialisasi tersebut tidak lain agar masyarakat Gresik mengerti akan jenis dan dampak dari pencemaran lingkungan serta limbah B3, sehingga diharapkan masyarakat dapat membantu untuk mengawasi atau memantau perilaku perusahaan industri agar tidak melakukan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 Tahun).

“...Rata-rata masyarakat disini itu tidak tahu *mbak* kalau perusahaan-perusahaan mencemari lingkungan. Mereka *nggak* sadar bahayanya apa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM sendiri untuk menyadarkan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat sekitar, terkhususnya di daerah-daerah yang berdiri perusahaan industri...”

Sosialisasi ini dilakukan secara kondisional, tergantung ada atau tidaknya dana dan juga waktu yang dimiliki oleh LSM FPSR. Apabila kekurangan dana, LSM FPSR ini melakukan sosialisasinya dengan disisipkan di kegiatan-kegiatan warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo (47 Tahun).

“...Jadi kegiatan sosialisasi kita itu ada yang disisipkan ada juga yang memang khusus untuk acara sosialisasi itu.”

Sosialisasi yang dilakukan LSM FPSR berkaitan dengan penyampaian materi mengenai bentuk pencemaran dan limbah B3. Sosialisasi tersebut terkadang berkoordinasi dengan dinas terkait seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 Tahun).

“...upaya-upaya sosialisasi itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan menggandeng dinas terkait tapi ya *nggak* sering karena kan juga butuh biaya...”

Untuk saat ini upaya sosialisasi terkait dengan pencemaran dan limbah B3 yang dilakukan LSM FPSR kepada warga sekitar industri, belum sepenuhnya berhasil. Sosialisasi yang telah dilakukan, belum dapat menekan tingginya tindakan pencemaran lingkungan. Selain itu, masih banyak pula warga yang masih kurang pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan jenis-jenis limbah B3 serta bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya intensitas LSM FPSR dalam melakukan sosialisasi dan juga minimnya cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi.

Hal tersebut dibuktikan dengan berita yang telah dipublikasikan oleh berita *online* yakni LiraMedia.co.id pada tanggal 06 Desember 2018 yang menyatakan bahwa tim LSM FPSR saat sidak menemukan limbah B3 jenis *slug* besi yang dibuang sembarangan di lahan milik warga Karangandong, Kecamatan Driyorejo. Berdasarkan sidak tersebut, diketahui limbah milik perusahaan PT Ispatindo yang telah diangkut oleh 4 truk tronton sejak seminggu yang lalu. Warga yang tidak mengetahui dan memahami jenis limbah tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk mengolah limbah tersebut. Seorang warga yang bernama Topan (40 tahun) tersebut ditugaskan untuk memilah besi dari limbah tersebut untuk diambilnya. Seorang warga tersebut pada awalnya tidak mengetahui bahwa limbah yang dipilahnya merupakan limbah yang berbahaya dan beracun, yang Topan tahu bahwa limbah tersebut adalah tanah merah yang bercampur dengan besi (www.LiraMedia.co.id diakses pada tanggal 08 Februari 2019).

Proses kedua pada langkah awal adalah pengawasam masyarakat. Pengawasan tersebut dalam bentuk pemantauan-pemantauan guna untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu permasalahan lingkungan seperti halnya pencemaran. Jika ditemukan suatu permasalahan lingkungan, maka dilakukan penyelidikan untuk mengetahui akar permasalahan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh LSM FPSR ini melibatkan masyarakat sekitar berdirinya pabrik industri. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah proses pemantauan. LSM FPSR ini juga memiliki seorang informan didalam setiap perusahaan di Kabupaten Gresik. Kebanyakan informan tersebut merupakan pegawai atau karyawan dari suatu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Widodo (47 Tahun).

“...Pastinya FPSR itu melakukan pemantauan, untuk pemantauannya itu dalam segala hal. Hal itu dilakukan untuk menelusuri ada atau tidaknya suatu pencemaran. Persoalan yang mungkin sudah terjadi secara otomatis kita kan akan melakukan pemantauan-pemantauan untuk mencari akar permasalahan tersebut...”

LSM FPSR dalam melakukan pemantauan ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian maupun dinas terkait untuk mendeteksi permasalahan pencemaran lingkungan. LSM FPSR ini secara rutin melaksanakan pemantauan terhadap proses pembuangan limbah mulai dari bahan-bahan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membuat suatu produksinya, lalu limbah yang akan dihasilkan dari proses produksinya, hingga cara perusahaan membuang limbah tersebut. Pemantauan LSM FPSR tersebut mulai dari pemantauan permasalahan pencemaran-pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah.

LSM FPSR ini mengalami kesulitan dalam hal pemantauan pencemaran udara terkait dengan bau dan bising. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan FPSR dalam mengukur tingkat kebauan dan kebisingan hingga dikatakan udara tercemar. Apabila pencemaran udaranya berbentuk partikel seperti *flay ash* dan *battom ash* masih dapat dipantau, namun apabila pencemarannya berupa bau dan bising, LSM FPSR sulit untuk memantaunya. Sehingga ketika LSM FPSR mendapati permasalahan pencemaran berupa bau dan bising, FPSR langsung melaporkan ke pihak yang berwajib.

Tidak hanya pencemaran udara, LSM FPSR ini juga memantau pencemaran air. Sumber mata air di daerah-daerah yang paling dekat dengan industrialisasi, hampir tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Seperti halnya di Kecamatan Driyorejo yang merupakan salah satu Kecamatan yang banyak berdiri perusahaan industri setelah Kecamatan Cerme. Di Driyorejo tersebut pemanfaatan air tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan industri yang meresapkan bahan-bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya ke dalam sumber air. Pada akhirnya menurunkan dan atau meningkatkan tingkat pH pada air yang awalnya pH air 6,5-7,5 (air aman untuk dikonsumsi). Air limbah maupun bahan buangan lainnya tersebut yang mengubah pH air yang awalnya air dapat dikonsumsi oleh masyarakat menjadi air yang tidak dapat dikonsumsi lagi oleh masyarakat Gresik.

Pencemaran air tidak hanya pada unsur pencampuran zat logam kedalam air, namun bentuk pencemaran air lainnya juga terjadi di Kecamatan Driyorejo tepatnya di sungai brantas Driyorejo yang baru-baru ini tercemar oleh

adanya limbah industri berupa busa yang mengandung deterjen yang sangat tinggi. Akibat dari tercemarnya air di Sungai Brantas ini mengganggu kehidupan hewan di air seperti halnya ikan. Banyak ikan-ikan yang mati mengambang di area Sungai Brantas tersebut. Ikan-ikan di air Sungai tersebut mengalami stres karena dampak dari pembuangan limbah ke air hingga berujung kematian pada ikan tersebut.

Fakta tersebut didukung dengan dokumen dari sebuah berita *online* yang dipublikasikan oleh Surabaya.tribunnews.com pada tanggal 28 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa telah ditemukan saluran air berbusa warna putih di wilayah di wilayah Sungai Driyorejo dan Wringinanom. Rata-rata kandungan mutu air Sungai Brantas tersebut melebihi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Busa putih tersebut mengandung deterjen yang sangat tinggi sehingga diperlukan bahan antidefoaming. Busa ini salah satu penyebab ikan-ikan banyak yang mati. (www.surabaya.tribunnews.com diakses pada tanggal 8 Februari 2019).

Untuk pemantauan terhadap pencemaran air, LSM FPSR ini mempunyai alat pengukur pH air yang dibagikan ke setiap anggota yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Ketika anggota menemukan saluran yang memiliki pH air kurang atau lebih dari pH yang seharusnya yakni 6,5 hingga 7,5 yang mana dinyatakan tercemar, maka LSM FPSR berusaha untuk menelusuri lebih lanjut akar dari permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 tahun).

“...Kita kan terus memantau suatu perusahaan misalnya perusahaan A menggunakan bahan bakar dari batu bara nanti kita pantau sisa pembakarannya dibuang kemana dan itu kita kaji ulang kembali. Kita survai saluran-saluran yang keluar dari perusahaan dan kita tes menggunakan alat yang sudah kita punya. Kita punya pH meter yang sudah dibagikan ke anggota-anggota yang turun ke lapangan untuk menyurvei pH air. Kalau pH air di saluran tersebut kurang atau bahkan melebihi pH air yang semestinya sebesar 6,5 sampai 7,5 itu kita akan menelusuri lebih lanjut lagi penyebabnya...”

Selain itu, LSM FPSR juga melakukan pemantauan terhadap pencemaran tanah atau daratan. Alasan LSM FPSR melakukan pemantauan terhadap pencemaran tanah yakni yang pertama karena kurangnya pemantauan langsung dari pihak pemerintah terhadap pencemaran-pencemaran yang terjadi di daratan. Pemerintah terkesan menunggu laporan dari warga terlebih dahulu baru ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo (47 tahun)

“...pemerintah ataupun polisi itu kalau ada permasalahan lingkungan seringnya itu nunggu laporan masuk dulu *mbak* dari warga. Nah dari

warga sendiri aja terkadang juga *nggak* sadar kalau lingkungannya dicemari *mbak*...”

Kedua, banyak perusahaan yang membuang limbah B3 di tempat pembuangan ilegal. Hal tersebut disebabkan karena di Jawa Timur belum memiliki lahan yang khusus untuk pembuangan, pemanfaatan hingga penetralan limbah B3. Se-Indonesia yang terdapat lahan khusus pembuangan dan pengolahan limbah B3 hanya ada di Cileungsi, Bogor saja. Hal ini menyebabkan biaya transportasi mahal karena harus dibuang di Bogor. Pada akhirnya banyak perusahaan yang membuang limbah B3 sembarangan di lahan-lahan yang kosong. Hal inilah penyebab banyak bermunculan lahan pembuangan ilegal di Kabupaten Gresik.

Banyak perusahaan industri memanfaatkan lahan-lahan kosong yang berada di pedalaman sebagai tempat pembuangan limbah B3 secara ilegal. Dikatakan ilegal karena tempat pembuangan limbah tersebut belum mendapatkan izin dari Dinas terkait. Hal ini disebabkan karena biaya transportasi untuk membuang limbah B3 ke Bogor itu cukup mahal, sehingga suatu industri di Gresik banyak yang memilih untuk menyelundupkan limbah B3 ke dalam tanah di Gresik.

Daerah yang paling sering dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah ilegal adalah daerah-daerah pedalaman, seperti halnya di Desa Karangandong, Kedamean, dan Legundi. Terdapat perusahaan industri yang menyelundupkan limbah B3 dengan cara mengeruk tanah sedalam beberapa kilometer dan dibuang, lalu ditimbun sampah, begitu seterusnya hingga yang terakhir ditimbun dengan tanah. Seperti yang telah dikatakan Widodo (47 tahun).

“...Biasanya yang sering dijadikan tempat pembuangan ilegal ya daerah bagian dalam seperti di Karangandong, Kedamean, terus Legundi itu. Jadi banyak yang dibuang disitu, dibuatkan sumur-sumur dengan kedalaman sekian dibuang begitu saja lalu ditimbun sampah, dibuang lagi, ditimbun sampah lagi yang terakhir ditimbun tanah nah diatasnya tersebut dan terkadang lahan pembuangan tersebut disewakan untuk sebuah bangunan. Yang sering kan seperti itu, sumur dibikin rapi, tertutup tidak bisa terlihat secara kasat mata ...”

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumen atau arsip dari sebuah berita *online* yakni Koran-sindo.com pada tanggal 08 Januari 2016 yang menyebutkan bahwa sampai saat ini Gresik belum memiliki tempat pembuangan limbah B3 secara legal. Limbah tersebut paling banyak dibuang sembarangan di Gresik bagian selatan yakni di daerah Driyorejo dan Wringinanom. Limbah B3 tersebut sering dibuang di bekas galian C. Kondisi tersebut cukup berbahaya bagi ekosistem tanah di Gresik Selatan. Setelah dibuang di galian C, limbah tersebut terkadang diaduk hingga tercampur dengan

tanah. Adanya pencampuran tersebut tidak hanya tanah saja yang mengalami pencemaran namun sumber air dalam tanah tersebut juga dapat tercemar. (www.koran-sindo.com diakses pada tanggal 08 Februari 2019).

Mengenai pemantauan pencemaran tanah yang dilakukan oleh LSM FPSR, mereka hanya menyurvei lahan-lahan yang kosong dan khususnya bagian pedalaman, karena di daerah pedalaman tersebut banyak lahan yang terindikasi menjadi pembuangan limbah ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Untuk pemantauan pencemaran tanah ini lebih mudah dilakukan oleh LSM FPSR karena terlihat oleh mata. Ketika telah menemukan limbah yang dibuang sembarangan di lahan yang ilegal, LSM FPSR melakukan suatu pengintaian untuk menemukan pelaku dari pembuangan limbah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 tahun).

“...kalau pemantauan pencemaran tanah itu lebih mudah *mbak*, kan kalau di tanah limbah itu lebih terlihat nampak mata *mbak*. Ya kita hanya menyurvei lahan-lahan kosong yang terindikasi menjadi tempat pembuangan limbah secara sembarangan *mbak*. Kalau kita nanti menemukan adanya limbah yang dibuang sembarangan di lahan yang bukan tempatnya untuk membuang limbah, ya yang selanjutnya yang kita lakukan itu pengintaian untuk mengetahui siapa sebenarnya yang sudah membuang limbah sembarangan tersebut...”

Selanjutnya, berita yang telah dipublikasikan oleh sebuah berita *online* yakni LiraMedia.co.id pada tanggal 06 Desember 2018 yang menyatakan bahwa tim LSM FPSR saat sidak menemukan limbah B3 jenis *slug* besi yang dibuang sembarangan di lahan milik warga Karangandong, Kecamatan Driyorejo. Berdasarkan sidak tersebut, diketahui limbah milik perusahaan PT Ispatindo yang telah diangkut oleh 4 truk tronton sejak seminggu yang lalu. Warga yang tidak mengetahui dan memahami jenis limbah tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk mengolah limbah tersebut. Seorang warga yang bernama Topan (40 tahun) tersebut ditugaskan untuk memilah besi dari limbah tersebut untuk diambilnya. Seorang warga tersebut pada awalnya tidak mengetahui bahwa limbah yang dipilahnya merupakan limbah yang berbahaya dan beracun, yang ia tahu bahwa limbah tersebut adalah tanah merah yang bercampur dengan besi (www.liramedia.co.id diakses pada tanggal 08 Februari 2019).

Proses ketiga pada tahap awal yakni komunikasi dengan perusahaan dengan tujuan memberikan saran atau usulan kepada perusahaan. Pemberian usulan atau saran ini didasarkan pada UU No. 30 tahun 2009 pada pasal 70 ayat 2 yang mana menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan salah satunya yakni dengan pemberian usulan

ataupun saran. Pemberian usulan dan saran tersebut juga dilakukan oleh pihak LSM FPSR terhadap perusahaan industri agar tidak melakukan kejahatan lingkungan hidup berupa pencemaran-pencemaran, baik pencemaran tanah, air maupun udara. Bentuk usulan yang diberikan LSM FPSR kepada perusahaan industri berupa cara mengolah agar tidak mencemari lingkungan atau bahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sebelum memberikan suatu usulan kepada perusahaan industri, LSM FPSR melakukan sebuah pemantauan preventif ada atau tidaknya kendala yang dialami perusahaan terkait pembuangan dan pemanfaatan limbah. Jika perusahaan memiliki kendala, dengan secara cepat tim LSM FPSR melakukan diskusi dengan para anggota untuk menentukan hal yang perlu disarankan atau diusulkan ke perusahaan industri.

Untuk saat ini LSM FPSR belum bisa memberikan usulan atau saran terhadap perusahaan jika terkait dengan kendala biaya untuk pengangkutan limbah B3 karena pada dasarnya di Jawa Timur sendiri belum juga memiliki lahan untuk pembuangan dan pengolahan limbah B3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 tahun).

“...Tidak semua saran dari kita itu berhasil seperti *mbak*, kalau masalah kendala pembuangan limbah B3 ya kita sendiri masih bingung, menyarankan dibuang di Bogor, alasannya biaya terlalu mahal. Menyarankan diolah sedemikian rupa, alasannya terlalu ribet...”

LSM FPSR hanya dapat memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi agar menyediakan lahan pembuangan dan pengolahan limbah B3 di Kabupaten Gresik karena penghasil limbah terbesar se-Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik. Jika terdapat lahan khusus pembuangan dan pengolahan limbah B3 di Gresik, maka perusahaan tidak akan dapat memiliki alasan untuk membuang limbahnya sembarangan maupun membuka lahan pembuangan limbah ilegal di Kabupaten Gresik, yang dapat memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat Gresik.

Langkah kedua setelah langkah awal adalah langkah lanjutan. Langkah lanjutan ini dilakukan ketika terjadi suatu kegagalan pada langkah awal. Langkah ini dilakukan ketika telah terjadi suatu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri. Langkah lanjutan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar perusahaan yang telah mencemari lingkungan, tidak mengulang lagi kesalahannya tersebut. Kegiatan yang hingga saat ini dilakukan oleh LSM FPSR yakni peneguran, pelaporan, dan penekanan masyarakat.

Pertama, peneguran. Peneguran yang dilakukan oleh LSM FPSR ini setelah mereka menemukan suatu akar permasalahan dan menemukan sebuah solusi atau saran untuk menangani agar perusahaan yang melakukan

pencemaran lingkungan tersebut tidak lagi melakukan kejahatannya yang dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat Gresik. Sasaran dalam peneguran ini adalah perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Peneguran ini dilakukan oleh LSM FPSR dengan cara bertamu ke perusahaan yang melakukan pencemaran. Ketika bertamu ke perusahaan yang bermasalah, LSM FPSR menyampaikan bahwa masyarakat terganggu dengan adanya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan menyampaikan saran mereka terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo (47 tahun).

“...Setiap ada permasalahan lingkungan yang disebabkan perusahaan industri, kita pasti bertamu di perusahaan tersebut. menyampaikan ada persoalan-persoalan di lingkungan seperti ini, dan kalau dari kajian kita di lingkungan hidup, otomatis ada indikasi seperti ini seperti ini, itu pasti akan dilakukan pada tahap-tahap itu sebelum adanya perselisihan. Itu pasti dilakukan. Kita sudah banyak melakukan hal tersebut di berbagai perusahaan *mbak*...”

Proses peneguran ini dilakukan oleh LSM FPSR dengan mengajak salah satu perwakilan warga yang merasakan dampak dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri. Pada proses ini sering terjadi kegagalan atau ketidakberhasilan. Hal ini disebabkan karena banyak dari perusahaan industri yang bermasalah, justru mengacuhkan peneguran dan pemberian saran dari LSM FPSR dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena mahal biaya pembuangan limbah B3 dan untuk melakukan suatu pengolahan limbah B3 merupakan suatu hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kedua, pelaporan. Proses pelaporan ini dilakukan oleh LSM FPSR ketika tidak menemukan sebuah solusi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Pelaporan ini dilakukan ketika terjadi kegagalan dalam proses peneguran dan juga ketika menemukan permasalahan pencemaran udara berupa bau dan bising. LSM FPSR mengalami kesulitan untuk memantau tingkat kebauan dan kebisingan karena tidak adanya alat untuk mengukurnya. Ketika mendapatkan keluhan dari warga terkait dengan masalah bau dan bising, yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah langsung melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar dapat di cek langsung dan diukur tingkat kebauan dan kebisingan oleh pihak DLH.

Setiap ada permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, LSM FPSR berkoordinasi dengan pihak DLH. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan oleh LSM FPSR terhadap DLH adalah pemaparan secara langsung permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di lapangan, dan tentunya sebelum melakukan pelaporan

tersebut LSM FPSR sudah melakukan pemantauan awal untuk mencari akar permasalahannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 tahun).

“...Tiap ada permasalahan lingkungan seperti pencemaran-pencemaran gitu kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lingkungan hidup seperti DLH kabupaten, kita yang memberikan penjelasan kepada DLH tentang permasalahan yang terjadi berdasarkan apa yang kita temukan pada proses pemantauan itu tadi...”

Pihak yang diberikan pelaporan oleh LSM FPSR tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup saja melainkan juga pihak Kepolisian. Ketika LSM FPSR telah melaporkan ke Dinas terkait namun respon dari Dinas tersebut dirasa sangat lambat, LSM FPSR langsung mengambil langkah untuk mencari solusi pemecah masalahnya.

Ketiga, penekanan masyarakat. Penekanan dilakukan LSM FPSR ketika cara-cara yang sebelumnya seperti peneguran maupun pelaporan, dirasa kurang ada hasil yang memuaskan. Ketika penanganan dari DLH dirasa lambat dalam penanganannya padahal laporan dari LSM FPSR sudah masuk, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah dengan melalui penekanan masyarakat. Bentuk penekanan yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah demonstrasi. Ketika aksi demonstrasi, LSM FPSR berkoordinasi dengan media massa baik media yang memuat berita *online*, cetak, maupun berita yang ditayangkan di televisi. LSM FPSR juga mengikutsertakan sejumlah warga yang merasakan dampak pencemaran, untuk turut ikut dalam demonstrasi yang dilakukannya.

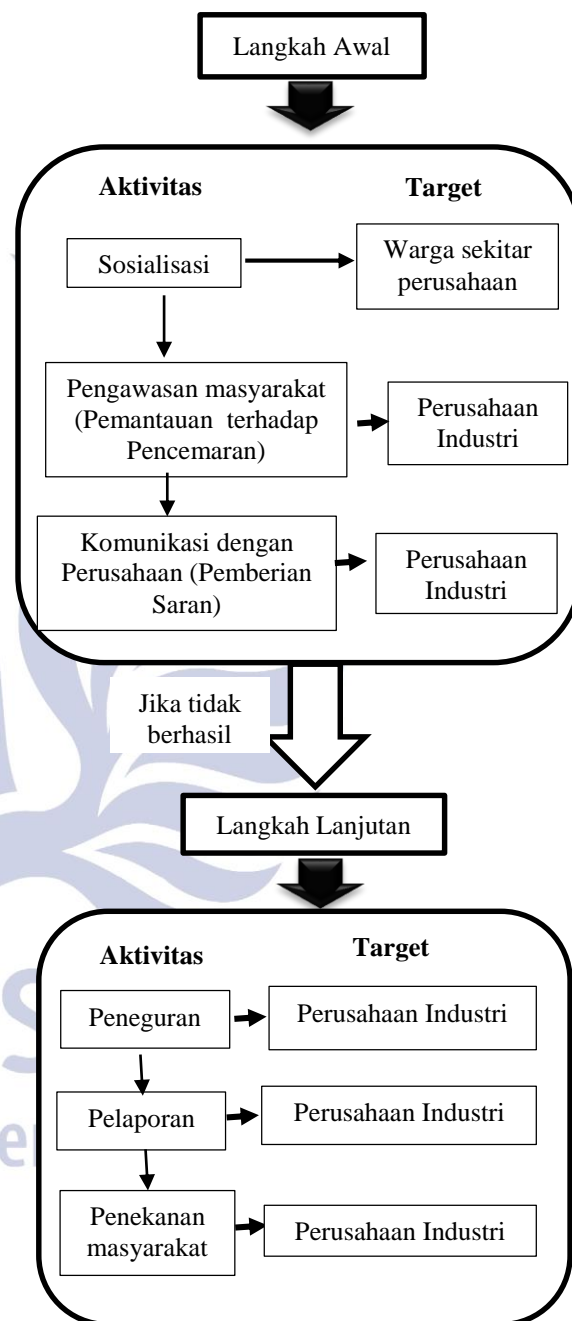
Menurut LSM FPSR, jika tidak melibatkan warga sekitar, tidak akan direspon baik oleh perusahaan. Begitupun juga ketika tidak melibatkan sejumlah media massa. Selain demonstrasi, LSM FPSR juga melakukan pemasangan banner di sekitar perusahaan yang bermasalah. Banner-banner tersebut berisikan keluhan-keluhan yang dirasakan warga dan juga terdapat pula sindiran didalamnya.

Demonstrasi yang dilakukan LSM FPSR terbukti dapat berhasil menekan pihak perusahaan, seperti halnya pada saat melakukan demonstrasi di perusahaan Miwon yang melakukan pencemaran udara berupa kebisingan mesin yang digunakan perusahaan. LSM FPSR bersama dengan sejumlah warga dan media massa berhasil untuk menekan perusahaan untuk tidak menggunakan mesin yang mengeluarkan suara keras hingga berujung pada kebisingan yang mengganggu warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmiasih (43 tahun).

“...dulu itu disini *nggak* hanya bau saja *mbak*, tapi juga suara mesin kueras jadinya berisik. Tapi setelah didemo warga sini, bareng juga sama FPSR itu akhirnya sekarang sudah tidak berisik lagi. Dulu sempat berisik, didemo terus tidak

berisi, terus berisik lagi, didemo lagi, dan sampai sekarang sudah tidak berisik lagi...”

Untuk memperjelas dari hasil penelitian terkait upaya LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan industri di Gresik, berikut dijelaskan dengan kerangka pemikiran dari hasil penelitian upaya LSM FPSR.



Bagan 1. Kerangka pemikiran dari hasil penelitian upaya LSM FPSR dalam mencegah gangguan lingkungan hidup yang disebabkan perusahaan industri

Pada suatu proses pasti didalamnya terdapat kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang harus dilalui. Begitu pula yang dihadapi oleh LSM FPSR ketika melakukan suatu proses pengendalian terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan industri

yang berupa pencemaran lingkungan. Kesulitan tersebut mulai dari kesulitan mengajak warga untuk kritis dalam menanggapi permasalahan, kesulitan dalam proses pemantauan seperti halnya pemantau terhadap pencemaran udara berupa bau, hingga terkadang kesulitan terkait dengan dana untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Terkait dengan perekrutan anggota LSM FPSR ini juga mendapati sebuah kendala. Saat ini anggota LSM FPSR berjumlah 460 anggota secara keseluruhan dan jumlah tersebut dirasa kurang karena LSM FPSR ini disebar lagi ke 16 Kecamatan yang berdiri perusahaan industri.

Pertama, kesulitan dalam hal mendapatkan anggota karena masyarakat sendiri kurang aktif di dalam menanggapi suatu permasalahan secara kritis, dan di masyarakat Gresik ini juga memandang latar belakang dari suatu pemimpin bukan dari profesionalitasnya LSM FPSR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo (47 tahun).

“...Jadi masyarakat disini menilai sosok ketua ini siapa, masa lalunya seperti apa. Masyarakat itu terbayang-bayang terus meskipun sudah merubah pola, merubah perilaku tapi kan *image* yang berkembang di masyarakat kalau dulunya gitu apapun yang dilakukan pasti yang akan dilihat itu di masa lalunya bukan yang sekarang.”

Usaha yang dilakukan LSM FPSR adalah dengan terus menunjukkan kepada masyarakat bahwa LSM FPSR itu menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang memang dapat membantu masyarakat dan menjalankannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. LSM FPSR terus berupaya untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam membantu baik itu dengan pendampingan secara langsung terhadap warga yang membutuhkan bantuan, maupun membantu dengan hal lainnya.

Kedua, kesulitan yang dihadapi oleh LSM FPSR ini ketika menangani perusahaan yang hanya mengambil cara termudahnya saja dalam hal pembuangan limbah. Ketika LSM FPSR memberikan saran kepada perusahaan bermasalah mengenai pembuangan maupun pengolahan limbah B3, banyak perusahaan yang justru menolak dengan alasan tidak adanya biaya. Ketika menyangkut biaya, hal yang dapat dilakukan FPSR adalah dengan mengadakan ke Dinas terkait. Apabila dari Dinas itu sendiri dirasa responnya lama, LSM FPSR ini mengambil langkah terlebih dahulu dengan melakukan aksi lalu di publikasi oleh media massa seperti televisi, koran maupun berita *online*. Aksi tersebut hanya merupakan suatu strategi dalam menekan perusahaan yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris (43 tahun).

“...penanganan limbahnya itu sendiri *mbak*, kita sudah menyarankan baik-baik nanti limbahnya dibuang kesana alasan perusahaannya biayanya

besar terus nanti kalau dimanfaatkan, diolah kayak gini alasannya terlalu ribet dan juga tidak ada lahan untuk pemanfaatannya. Jadi ya serba repot *mbak*, harapan kami ya itu tadi dari Pemprov menyediakan lahan untuk pembuangan dan pengolahan limbah B3 biar mereka tidak punya alasan lagi...”

Ketiga, kesulitan yang dialami LSM FPSR yakni ketika dalam proses pemantauan terhadap pencemaran udara yang berupa bau dan bising. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alat sehingga pihak LSM FPSR belum bisa menguji baku tingkat kebauan dan juga kebisingan. Hal yang dilakukan oleh LSM FPSR ketika menemukan atau mendapati keluhan warga terkait dengan bau ataupun bising adalah dengan langsung melaporkan ke pihak DLH agar dari pihak tersebut melakukan pengujian atau pengecekan langsung ke tempat terjadinya pencemaran tersebut.

Keempat, kesulitan yang dialami LSM FPSR yakni mengenai dana operasional untuk mengadakan sosialisasi limbah B3 secara rutin. Untuk menyiasati keterbatasan dana, LSM FPSR sering menyisipkan sosialisasinya di kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Adanya kesulitan ini, LSM FPSR hanya bisa berharap terhadap pemerintah untuk mengadakan sosialisasi terkait limbah B3 di bangku sekolah agar dapat terlaksana dengan rutin sehingga apa yang disosialisasikan tersebut dapat terinternalisasi dalam diri warga dengan baik.

Pembahasan

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kontrol sosial, dimana yang melakukan kontrol adalah LSM FPSR dan yang dikontrol adalah perilaku perusahaan industri dengan tujuan agar perusahaan industri tidak melakukan pencemaran-pencemaran lingkungan. Berdasarkan teori kontrol sosial, kejahatan tidak dipengaruhi oleh pendidikan orang melalui budaya dan pengalaman, atau sebaliknya. Kejahatan lebih sering terjadi karena merupakan cara tercepat, termudah, dan termurah untuk memperoleh kepuasan (terkadang merupakan cara satu-satunya) (Siahaan, 2009: 130). Hal ini sejalan dengan fenomena pada penelitian ini yang mana penyebab perusahaan industri di Gresik banyak melakukan pembuangan limbah B3 secara sembarangan karena yang pertama, tidak adanya lahan pembuangan dan pengolahan limbah B3 yang legal di Jawa Timur. Se-Indonesia, tempat pembuangan dan pengolahan limbah B3 yang legal hanya ada di Cileungsi, Bogor. Kedua, mahal biaya transportir untuk mengangkut limbah B3 ke Bogor. Kedua penyebab tersebut mengakibatkan banyak dari pihak perusahaan industri sedang maupun besar mengambil cara termudah dan termurah dengan membuangnya secara sembarangan, sehingga banyak bermunculan lahan-lahan pembuangan limbah B3 secara

ilegal di Gresik. Lahan-lahan tersebut banyak ditemukan di daerah-daerah pedalaman.

Hirschi menjelaskan bahwa tingkah laku yang menyimpang diakibatkan karena tidak adanya atau kurangnya keterikatan (moral) terhadap masyarakat. Keterikatan itu sendiri digunakan untuk melihat sejauh mana individu atau kelompok peka terhadap pikiran, perasaan, maupun keinginan dari masyarakat. Mereka yang kurang peka, dianggap ikatannya dengan masyarakat lemah, dan jika ikatan tersebut melemah maka kecenderungan melakukan penyimpangan tinggi. Seperti halnya perusahaan industri di Gresik yang melakukan penyimpangan berupa pencemaran-pencemaran lingkungan. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran pihak perusahaan terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Jika terdapat pencemaran lingkungan, maka pihak yang melakukan pencemaran tersebut telah merampas hak-hak individu masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Adanya permasalahan tersebut memunculkan inisiatif dari lembaga sosial yakni LSM FPSR untuk turut berpartisipasi mengendalikan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri.

Hal tersebut didasarkan pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 yang berbunyi (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa (a) Pengawasan sosial; (b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau (c) Penyampaian informasi dan atau pelaporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk (a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepoloporan masyarakat; (d) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan (e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 pada pasal 70 mengenai peran masyarakat tersebut, LSM FPSR turut berpartisipasi dalam mengontrol tindakan-tindakan perusahaan industri yang melakukan suatu kejahatan lingkungan yakni berupa pencemaran-pencemaran, baik itu pencemaran udara, air maupun tanah. Upaya yang telah dilakukan oleh LSM FPSR dalam rangka

pengendalian sosial terhadap perusahaan industri di Gresik dilakukan dengan melalui 2 langkah yakni langkah awal dan langkah lanjutan.

Langkah awal ini merupakan langkah pertama yang dilakukan LSM FPSR untuk mencegah adanya pencemaran-pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri. Agen pengendalian sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga masyarakat aktif di Kabupaten Gresik yakni LSM FPSR. Pada langkah awal, LSM FPSR ini memiliki beberapa proses atau kegiatan untuk meminimalisasi pelaku kejahatan lingkungan di Kabupaten Gresik. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM FPSR sebagai bentuk pencegahan terjadinya pencemaran-pencemaran lingkungan yakni sosialisasi, pengawasan masyarakat (pemantauan pencemaran) dan komunikasi dengan perusahaan (pemberian saran).

Sosialisasi yang dilakukan LSM FPSR berkaitan dengan penyampaian materi mengenai bentuk pencemaran dan limbah B3. Sosialisasi tersebut terkadang berkoordinasi dengan dinas terkait seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk saat ini upaya sosialisasi terkait dengan pencemaran dan limbah B3 yang dilakukan LSM FPSR kepada warga sekitar industri, belum sepenuhnya berhasil. sosialisasi yang dilakukan belum dapat menekan tingginya tindakan pencemaran lingkungan. Selain itu, masih banyak pula warga yang masih kurang pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan jenis-jenis limbah B3 serta bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya intensitas LSM FPSR dalam melakukan sosialisasi dan juga minimnya cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi.

Pemantauan yang dilakukan oleh LSM FPSR mulai dari pemantauan permasalahan pencemaran-pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah. Pemantauan pencemaran air dilakukan dengan menyurvei aliran-aliran air dan mengecek kadar pH dengan alat ukur pH air yang telah dibagikan ke anggota-anggota yang bertugas. Untuk pemantauan pencemaran udara, LSM FPSR hanya melakukan survai ke cerobong-cerobong perusahaan, dan untuk pemantauan pencemaran tanah, dilakukan dengan survai ke lahan-lahan kosong yang terindikasi menjadi tempat pembuangan limbah ilegal.

Lalu komunikasi dengan perusahaan yang bertujuan memberikan saran kepada perusahaan, dilakukan ketika LSM FPSR mendapati perusahaan yang kesusahan dalam mengolah limbah mereka. Sebelum LSM FPSR memberikan suatu usulan kepada perusahaan industri, FPSR melakukan sebuah pemantauan preventif untuk mengetahui ada tidaknya kendala pada perusahaan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang dihasilkan perusahaan industri. Jika pihak perusahaan memiliki

kendala, dengan secara cepat tim LSM FPSR melakukan diskusi dengan para anggota untuk menentukan hal yang perlu disarankan atau diusulkan ke perusahaan industri.

Ketika langkah awal tersebut kurang dan atau bahkan tidak berhasil, maka langkah yang diambil oleh LSM FPSR adalah melakukan langkah lanjutan yang berisi 3 proses yakni peneguran, pelaporan, dan penekanan masyarakat. Peneguran yang dilakukan oleh LSM FPSR ini setelah mereka menemukan suatu akar permasalahan dan menemukan sebuah solusi atau saran untuk menangani agar perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut tidak lagi melakukan kejahatannya yang dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat Gresik.

Proses pelaporan oleh LSM FPSR dilakukan ketika terjadi kegagalan dalam proses peneguran dan juga ketika menemukan permasalahan pencemaran udara berupa bau dan bising. LSM FPSR mengalami kesulitan untuk memantau tingkat kebauan dan kebisingan karena tidak adanya alat untuk mengukurnya. Pihak yang diberikan pelaporan oleh LSM FPSR tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup saja melainkan juga pihak Kepolisian.

Penekanan dilakukan LSM FPSR ketika cara-cara yang sebelumnya seperti peneguran maupun pelaporan, dirasa kurang ada hasil yang memuaskan. Apabila penanganan dari DLH dirasa lambat dalam penanganannya padahal laporan dari LSM FPSR sudah masuk, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah dengan melalui penekanan masyarakat. Bentuk penekanan yang dilakukan oleh LSM FPSR adalah demonstrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh LSM FPSR ini, melibatkan media massa baik media yang memuat berita *online*, cetak, maupun berita yang ditayangkan di televisi. LSM FPSR juga mengikutsertakan sejumlah warga yang merasakan dampak pencemaran, untuk turut ikut dalam demonstrasi yang dilakukannya. Selain bentuk demonstrasi, LSM FPSR juga melakukan pemasangan banner di sekitar perusahaan yang bermasalah. Banner-banner tersebut berisikan keluhan-keluhan yang dirasakan warga dan juga terdapat pula sindiran didalamnya.

PENUTUP

Simpulan

Upaya yang dilakukan oleh LSM FPSR untuk mencegah gangguan lingkungan hidup di Gresik yang disebabkan oleh perusahaan industri di Kabupaten Gresik melalui 2 langkah yakni langkah awal dan langkah lanjutan. Langkah awal yang dilakukan berupa (a) Sosialisasi terkait pencemaran lingkungan dan limbah B3. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang dekat dengan perusahaan industri agar masyarakat tersebut dapat membantu LSM FPSR dalam

melakukan pengawasan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan industri. Untuk sekarang ini, sosialisasi tersebut belum berhasil karena kurang berhasil karena keterbatasan dana, waktu dan minimnya cakupan peserta; (b) Pengawasan masyarakat berupa pemantauan terhadap pencemaran. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota LSM FPSR dan dibantu dengan masyarakat; dan (c) Komunikasi dengan perusahaan berupa pemberian saran terkait cara mengolah limbah dengan baik. Kegiatan ini ditujukan kepada perusahaan industri agar tidak melakukan pencemaran.

Sedangkan langkah lanjutan yang dilakukan oleh LSM FPSR yakni (a) Peneguran yang disertai pemberian saran. Kegiatan ini ditujukan ke perusahaan industri yang telah melakukan pencemaran lingkungan; (b) Pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian setempat; dan (c) Penekanan masyarakat yang berupa aksi demonstrasi dan pemasangan banner yang berisi keluhan serta sindiran.

Hambatan yang dialami oleh LSM FPSR, yakni (a) Kesulitan dalam hal mendapatkan anggota karena masyarakat sendiri kurang aktif dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, dan di masyarakat Gresik ini juga memandang latar belakang dari suatu pemimpin bukan dari profesionalitasnya LSM FPSR; (b) Mahalnya biaya pembuangan dan pengolahan limbah B3 sehingga ketika LSM FPSR memberikan saran, banyak perusahaan beralasan dengan tidak adanya biaya; (c) Kesulitan ketika melakukan pemantauan terhadap pencemaran udara yang berupa bau dan bising; dan (d) Minimnya ketersediaan dana untuk mengadakan sosialisasi limbah B3 secara rutin.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan, maka dapat diajukan beberapa saran untuk meminimalisasi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan industri di Gresik yakni Pertama, untuk pihak perusahaan baik perusahaan besar maupun sedang, agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya peraturan yang telah tercantum di dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPH dan menjalankan proses produksi sesuai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang telah disepakati. Pihak perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya lingkungan hidup dalam keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi saja. Kesadaran untuk tidak merusak lingkungan ini penting untuk ditanamkan dalam diri perusahaan.

Kedua, pihak pemerintah maupun dinas terkait yang diberikan tugas untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan AMDAL harusnya lebih tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi apabila terdapat suatu perusahaan yang tidak dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, dan alangkah baiknya pemerintah membuka lahan khusus pembuangan dan pengolahan limbah B3 di wilayah Gresik, karena mengingat Gresik merupakan daerah penyumbang limbah B3 terbesar di Jawa Timur.

Ketiga, pihak masyarakat harusnya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan industri. Masyarakat, dan pemerintah seharusnya lebih meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan industri yang berupa pengrusakan lingkungan, agar dapat meminimalisasi tingkat pencemaran dari proses industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- BPS Gresik. 2015. *Jumlah Industri Besar Sedang Kabupaten Gresik*. Diakses dari <https://gresikkab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/57/jumlah-industri-besar-sedang-kabupaten-gresik-2013.html> (diakses pada tanggal 24 November 2018).
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gresiknews. 2016. *Dari 125 LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Gresik Hanya 90 Saja yang Aktif*. Diakses dari <http://gresiknews.co/dari-125-lsm-yang-terdaftar-di-bakesbangpol-gresik-hanya-90-saja-yang-aktif/> (diakses pada tanggal 24 November 2018).
- Jajeli. 2016. *Jawa Timur Dinilai Belum Maksimal Kelola Limbah B3*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3112953/jawa-timur-dinilai-belum-maksimal-kelola-limbah-b3> (diakses pada tanggal 23 November 2018).
- Jatim Antaranews. 2017. *Legislator Gresik Tindaklanjuti Laporan {encemaran Lingkungan Warga*. Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/205206/legislator-gresik-tindaklanjuti-laporan-pencemaran-lingkungan-warga> (diakses pada tanggal 24 November 2018).
- Junaidi. 2018. *FPSR Akan Gelar Aksi Damai di Depan Pabrik PT Surya Pertiwi Nusantara*. Diakses dari <http://arsip.surabayapost.id/read-20784-fpsr-akan-gelar-aksi-damai-di-depan-pabrik-pt-surya-pertiwi-nusantara> (diakses pada tanggal 26 Desember 2018).
- Junaidi. 2018. *FPSR Gresik Buka Layanan Ambulance Gratis*. Diakses dari <http://arsip.surabayapost.id/read-24971-fpsr-gresik-buka-layanan-ambulance-gratis> (diakses pada tanggal 26 Desember 2018).
- Junaidi. 2018. *Ratusan Warga Demo PT Miwon Indonesia*. Diakses dari <http://arsip.surabayapost.id/read-35031-ratusanwarga-demo-pt-miwon-indonesia> (diakses pada tanggal 24 November 2018).
- Liramedia. 2018. *Puluhan Ton Limbah B3 Diduga dari PT Ispatindo Dibuang Sembarangan*. <http://www.liramedia.co.id/read/puluhan-ton-limbah-b3-diduga-dari-pt-ispatindo-dibuang-sembarangan> (diakses pada tanggal 26 Desember 2018).
- Siahaan, Jokie M.S. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Sungai Brantas di Driyorejo Gresik Tercemar Limbah Industri*. Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/amp/2018/10/28/sungai-brantas-di-driyorejo-gresik-tercemar-limbah-industri-malam-minggu-diduga-rawan-pembuangan> (diakses pada tanggal 10 Februari 2019).
- Sukmadinata, Syaodih N. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Trans. 2018. *300 Ton Limbah B3 Diduga Masuk Melalui Pelabuhan Maspion Gresik*. Diakses dari <http://beritatrans.com/2017/02/23/7-300-ton-limbah-b3-diduga-masuk-melalui-pelabuhan-maspion-gresik/> (diakses pada 26 Desember 2018).
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyudianto. 2018. *Warga Mengira Rongsokan Ternyata Limbah B3*. Diakses dari <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/09/01/94207/warga-mengira-rongsokan-ternyata-limbah-b3> (diakses dari 24 November 2018).